

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat berdasarkan “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”, diperlukan lembaga perwakilan rakyat yang mampu menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mewujudkan lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan daerah, perlu menata Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Agar terciptanya perwakilan-perwakilan rakyat yang memang benar-benar melakukan tugasnya dengan baik tidak menyalahgunakan apa yang sudah rakyat percayakan ke para wakil-wakil rakyat. Untuk undang-udangnya merujuk pada undang-undang (UU) tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menjadi UU No 13 tahun 2019.

Aspirasi dari masyarakat kepada dewan harus dapat dikelola dengan baik sesuai dengan mekanisme yang ada. Aspirasi masyarakat atas kebijakan suatu instansi pemerintahan baik yang bersifat positif maupun negatif itu akan baik untuk ke instansi itu sendiri. Aspirasi masyarakat juga sangat berpengaruh besar

terhadap kinerja dalam pemerintahan dan dapat menjadi gangguan operasional instansi pemerintahan bila tidak di tanggapi dengan serius. Besarnya aspirasi terhadap instansi pemerintahan, mengharuskan instansi pemerintah mampu memonitoring isu yang berkembang di masyarakat terutama yang berkaitan dengan pemerintahan.

Tingginya tuntutan masyarakat akan pemenuhan informasi, dan kritisnya masyarakat dalam menyikapi isu di pemerintahan, menjadi alasan instansi pemerintahan seperti DPRD membutuhkan peran humas dan bagian lainnya dalam monitoring aspirasi masyarakat. Pemerintahan dituntut untuk membangun dan mempertahankan image positif serta menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat maupun media. Dengan begitu para pengelola aspirasi masyarakat di DPRD menjadi ujung tombak dalam kelangsungan jalannya pemerintahan dalam menghadapi aspirasi masyarakat. Dari proses pengelolaan aspirasi masyarakat tersebut DPRD dapat mengetahui besarnya respon masyarakat terhadap pemerintahan, reaksi masyarakat akan kebijakan pemerintah yang baru, keluhan bahkan kritik dan saran bagi pemerintahan. Maka DPRD Kota Tasikmalaya harus mempunyai kepekaan, kemampuan analisis yang tinggi sehingga tanggap akan keluhan-keluhan atau informasi melalui aspirasi masyarakat.

Dalam mengartikulasikan aspirasi masyarakat tersebut, ada berbagai macam masalah yang mungkin belum dapat diselesaikan oleh aparatur terkait seperti masih adanya kurang komunikasi antar bagian yang dimana pengelolaan administratif aspirasi itu ada diranah humas dan protokol akan tetapi kadang aspirasi itu disalurkan melalui Tata usaha atau melalui sekretaris pribadi

dewan dan baru disampaikan ke para anggota dewan untuk dijadikan suatu kegiatan seperti audiensi atau bahkan adanya demo dari para masyarakat dan mahasiswa untuk menyalurkan aspirasinya kepada para anggota dewan, meskipun aspirasi tersebut memang benar tersampaikan tetapi dengan adanya permasalahan yang terjadi di dalam suatu organisasi pemerintah seperti ini yang dimana permasalahan ini dapat terselesaikan dengan efisien, permasalahan yang ada terjadi di DPRD Kota Tasikmalaya ini mungkin ada beberapa kesamaan dengan DPRD Kota lainnya, untuk permasalahannya itu adalah para anggota dewan mungkin masih belum menepati janjinya pada saat kampanye kepada masyarakat yang dimana masyarakat pasti akan mengharapkan sesuatu yang lebih dalam hal kesejahteraan yang masyarakat inginkan. Selanjutnya masih adanya anggota dewan yang saat di demo oleh masyarakat mereka malah tidak hadir untuk menemui para pendemo padahal masyarakat hanya ingin bertemu para anggota dewan terutama pimpinan DPRD untuk menyalurkan aspirasi atau keluhan-keluhannya agar dapat didengar, maka dari itu permasalahan seperti ini di dalam suatu instansi pemerintah harus cepat terselesaikan agar dalam hal pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik antara masyarakat dan anggota DPRD Kota Tasikmalaya.

Selanjutnya adalah DPRD Kota Tasikmalaya juga mempunyai beberapa media sosial seperti website dan instagram yang dimana itu berisi tentang berita-berita harian tentang kegiatan dewan agar masyarakat dapat mengetahui kinerja dari wakil rakyat itu seperti apa.

Gambar 1.1



Instagram DPRD Kota Tasikmalaya

Sumber : <https://instagram.com/dprdkotatasikmalaya?igshid=YmMyMTA2M2Y=>

DPRD Kota Tasikmalaya juga mempunyai Instagram yang dimana isinya itu adalah kegiatan-kegiatan dari para anggota dewan maka akan dipost melalui instagram DPRD ini.

**Gambar 1.2**  
**Website DPRD Kota Tasikmmalaya**



Sumber : <https://dprd-tasikmalayakota.go.id/>

Ini adalah gambaran dari media sosial dari DPRD Kota Tasikmalaya ada instagramnya dan websitenya untuk media sosial lainnya masih belum ada. Dengan adanya instagram dan website ini maka masyarakat dapat mengetahui kinerja dari dewan dan bisa juga masyarakat mendapatkan informasi lebih dari instagram dan website ini.

Adapun penelitian terdahulu yang bertema Strategi Pemerintah ini untuk referensi dan acuan untuk peneliti dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperbanyak teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan diantaranya: Kasmira dengan No induk 105610549315, falkultas Ilmu Sosial dan Politik program studi Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 2020, “Strategi Pemerintah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kabupaten Gowa, tujuan pelitian ini Untuk mengetahui strategi pemerintah dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Gowa”.

Dewi Kurniasih dan Yudi Rusfiana meneliti “ Fungsi reses anggota DPRD dalam mengartikulasikan aspirasi masyarakat Kabupaten Bandung, tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui bagaimana DPRD Kabupaten Bandung menjalankan kegiatan reses dengan baik atau tidak.

Michael G. H, Goni, Heman Nayoan, dan Daud Liando meneliti mengenai “Penyerapan Aspirasi Masyarakat Oleh Anggota Dprd Di Kabupaten Minahasa Selatan Periode 2014-2019 ”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Penyerapan aspirasi oleh anggota DPRD di Kabupaten Minahasa.

Ismitaru Nurilla Sujianti 201310040311319, program studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Muhammadiyah Malang pada 2018 meneliti mengenai “Strategi Humas Dalam Meningkatkan Citra Positif Dprd Kota Malang”. hasil dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apa dan bagaimana Strategi Humas dalam Meningkatkan Citra Positif DPRD Kota Malang.

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu daerah yang diteliti dan permasalahan yang akan diteliti. penelitian ini memfokuskan pada Strategi DPRD Dalam Mengartikulasikan Aspirasi Masyarakat Di Kota Tasikmalaya, Berdasarkan latar belakang yang di jelaskan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang di tuangkan dalam suatu skripsi yang berjudul “Strategi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Mengartikulasikan Aspirasi Masyarakat Di Kota Tasikmalaya “

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Strategi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Mengartikulasikan Aspirasi Masyarakat Di Kota Tasikmalaya dilihat dari aspek *Puposes, Environtment, Direction, Action, Learning?*

## **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana strategi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam mengartikulasikan aspirasi masyarakat di Kota Tasikmalaya dilihat dari aspek tujuan, lingkungan, pengarahan, tindakan, dan pembelajaran apakah tercapai dengan baik.

1. Untuk mengetahui tujuan DPRD Kota Tasikmalaya dalam mengartikulasikan aspirasi dari masyarakat.
2. Untuk memahami lingkungan di DPRD Kota Tasikmalaya dalam mengartikulasikan aspirasi masyarakat
3. Untuk mendalami pengarahan dari DPRD Kota Tasikmalaya dalam mengartikulasikan aspirasi masyarakat
4. Untuk memahami dan mengartikan tindakan apa yang dilakukan DPRD Kota Tasikmalaya dalam mengartikulasikan aspirasi masyarakat
5. Untuk memahami dan menginterpretasikan pembelajaran yang dilakukan DPRD Kota Tasikmalaya dalam mengartikulasikan aspirasi masyarakat

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini untuk peneliti sangat berperan besar dalam menjadikan peneliti mendapatkan pengalaman yang sangat berharga karena peneliti harus terjun kelapangan langsung dan dapat mengetahui apa saja yang terjadi khususnya DPRD Kota Tasikmalaya, selanjtnya untuk kegunaan lainnya yaitu :

1. Manfaat Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu Pemerintahan di DPRD Kota Tasikmalaya, terutama mengenai strategi mengartikulasikan aspirasi masyarakat oleh DPRD Kota Tasikmalaya.
2. Manfaat Praktis
  - a) Manfaat bagi peneliti, Penelitian ini diharapkan dapat membuat peneliti lebih memahami strategi DPRD secara lebih mendalam, khususnya mengenai mengartikulasikan aspirasi masyarakat.
  - b) Manfaat bagi Universitas, penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan wawasan dan literatur tentang strategi DPRD dalam mengartikulasikan aspirasi masyarakat di Kota Tasikmalaya, bagi universitas, khususnya program studi Ilmu Pemerintahan.
  - c) Manfaat bagi Instansi DPRD Kota Tasikmalaya, penelitian ini bagi instasi Sekretariat DPRD Kota Tasikmalaya, diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi tentang strategi DPRD dalam mengartikulasikan aspirasi masyarakat.